

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Sipil Penyandang Disabilitas Mental dalam Mendapatkan Akses Dokumen Kependudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak penyandang disabilitas mental dalam mendapatkan akses dokumen kependudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan tidak adanya program khusus bagi penyandang disabilitas mental dan pelayanan administrasi kependudukan yang masih bersifat pasif. Selain itu, tidak terdapat data penyandang disabilitas mental di Dukcapil maupun di tingkat kelurahan, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Kondisi ini diperparah dengan

keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta tidak adanya dukungan anggaran dan kendaraan operasional. Akibatnya, masih ditemukan penyandang disabilitas mental yang tidak memiliki dokumen kependudukan, bahkan hingga meninggal dunia tanpa identitas.

2. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas mental di Kabupaten Bengkulu Selatan belum mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip keadilan belum terwujud secara substantif karena tidak adanya perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas mental. Selain itu, terdapat indikasi kelalaian dalam pelaksanaan amanah oleh pemerintah daerah, yang terlihat dari tidak optimalnya implementasi kebijakan serta masih adanya penyandang disabilitas mental tanpa identitas hukum. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sesuai dengan nilai-nilai dalam

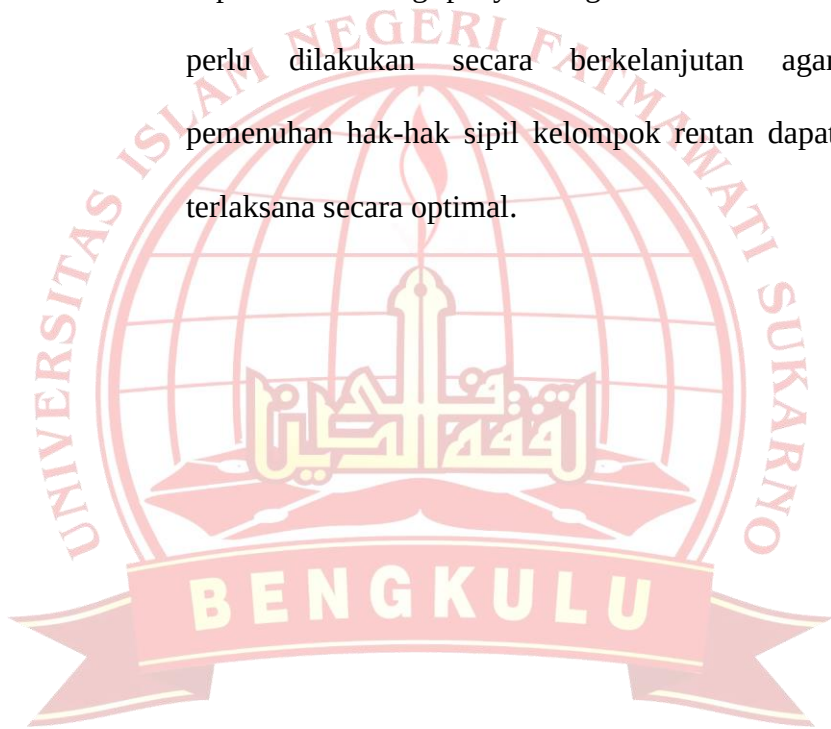
siyash tanfidziyah yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dapat mengembangkan program khusus bagi penyandang disabilitas mental, seperti sosialisasi mengenai hak sipil dan akses adminduk, pelayanan jemput bola untuk pendataan, perekaman, dan penerbitan dokumen kependudukan, serta dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pendataan penyandang disabilitas mental secara terpadu berbasis *by name by address*.
2. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat mendorong integrasi data penyandang disabilitas mental antarinstansi serta meningkatkan dukungan anggaran, sarana, dan

sumber daya manusia guna menunjang pelayanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif. Selain itu, sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas mental perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemenuhan hak-hak sipil kelompok rentan dapat terlaksana secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim, Hadis Tentang Kepemimpinan

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-nisa: 58.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah: 32

B. Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Garfika. 2019.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006

Arifin, Firdaus. *Hak asasi manusia: Teori, perkembangan, dan pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media. 2019.

Ashar, Dio. *Panduan Penanganan Perkarapenyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Universitas Indonesia: Mappi Fh. 2019

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018.

Buyung, Adnan. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.

Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

- El-Muhtaj, Majda. *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2015.
- Evendia, Malicia. *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*. Lampung: Pustaka Media. 2022
- Gunadaya, Widiada. *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2017.
- Hanifah, Ledia. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas* Jakarta: Beeboks Publishing. 2018.
- Haryanto, et.al. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa. 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2017
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Nurdin, Nurilah, et.al. *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi*. Purbalingga: Sketsa Media. 2022.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih siyasah*. Yogyakarta: Ombak. 2014.
- Riyadi, Eko. *Hukum hak asasi manusia: Perspektif internasional, regional, dan nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018.
- Rosyidah, Masayu. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.

Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian Hukum* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.

Sjadzali, Munawir. (1993). *Islam dan tata negara: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Jakarta: UI Press. 1993

Solikin, Nur *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media 2019.

Utama, Cholidah, *Hak Asasi Manusia Palembang*: Noerfikri Offset. 2022.

Yusdani. *Fiqh politik Muslim: Doktrin, sejarah, dan pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books. 2012.

C. Jurnal

Pratama, Aan “Konsep Pelayanan Publik dalam Bidang Siyasah”, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, (Agustus, 2025)

Suhaimi, Ahmad, Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik: Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Siyasah*, (Desember, 2025)

Rachmadhanty, Aulia, “Efektivitas Layanan Peduli Dilan (Disabilitas, ODGJ, dan Lansia) Dalam Meningkatkan Pelayanan Adminduk di Dukcapil Sidoarjo”, *Jurnal Publika*, (Juni, 2025)

Fausi, Achmad, Jaih Mubarak. “Fikih Pemimpin: Kontekstualisasi Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*. (Desember 2023)

Hapsari, Ratih “Upaya Pemenuhan Hak ODGJ Atas Pelayanan Administrasi Kependudukan.” *Jurnal Pelayanan Publik*. (Februari, 2022).

Masyrofah. “Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah.” *‘Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*. (Maret, 2022).

Medina, Farhan. Al-Mukhtar. “Kepemimpinan Menurut Abdullah Ibnu Abbas,” *Al Munir: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*. (Oktober, 2024)

Tsani, Naurah, “Kajian Kualitas Layanan Ktp-Elektronik Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dan Lansia Di Kabupaten Mojokerto”, *Jurnal Publika Unesa*, (Oktober, 2024)

Odelan, Nadia, “Hak Pelayanan Dan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Terlantar”, *Jurnal Pusham Unimed*, (Juni, 2022)

Nurnoveriyanti, Siti. “Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi ODGJ Perspektif Siyasah Tanfidziyah.” *Jurnal Pemikiran Islam*. (Oktober, 2024).

D. Skripsi

Alicia. *Implementasi program pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan (Jemput bola di Kota Batu)*. Universitas Brawijaya. Malang: Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Tata Negara. 2022.

Anggraini, Chintya. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa*. Universitas Raden Intan Lampung: Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Tata Negara 2022.

Rahma, Annisa, “Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan”, Skripsi Universitas Brawijaya, 2021

Savana, Allaily. *Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan*. UIN K.H Abdurrahman Wahid. Pekalongan: Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Tata Negara. 2024.

Siagian, Mei Priwanti. *Pemenuhan Hak ODGJ Terlantar Di Kota Tarakan*. Universitas Tarakan: Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum, 2022.

E. Internet

Haryanti, Aisyah Dini. *Jumlah ODGJ di Kabupaten Bengkulu Selatan tinggi*. RRI. <https://rri.co.id/daerah/1583380/jumlah-odgi-di-kabupaten-bengkulu-selatan-tinggi> Pada hari Sabtu, 5 Juli 2025, Pukul 16.42 WIB

Koranrb.id, *RSJK Soeprpto Bengkulu Rawat Puluhan ODGJ Tanpa Identitas! Mayoritas dari Seluma dan Bengkulu Selatan*, dikutip dari <https://www.koranrb.com/share/p/18UJNST1b2/> pada hari Jum'at , 24 April 2026, Pukul 10.13 WIB

Ary, Rahmad, *5 Tahun di Jalanan Kota Manna, ODGJ Tanpa Identitas Tewas Jadi Korban Tabrak Lari*, dikutip dari <https://betv.disway.id/read/72483/5-tahun-di-jalanan-kota-manna-odgi-tanpa-identitas-tewas-jadi-korban-tabrak-lari> Pada hari Jum'at, 24 April 2026. Pukul 10.15 WIB

Rahmawati, Sri. *Dinsos Bengkulu Selatan siap tangani ODGJ..* <https://www.sinarfakta.com> pada hari Sabtu, 5 Juli 2025, Pukul 19.21 WIB

Indonesiaraja.com, *Layanan Jemput Bola Disdukcapil Bengkulu Selatan Terkendala Sinyal, Pelayanan Dialihkan ke Kantor*, <https://indonesiaraja.com/layanan-jemput-bola-disdukcapil-bengkulu-selatan-terkendala-sinyal-pelayanan-dialihkan-ke-kantor> pada hari Senin, 01 Juni 2026, Pukul 22.05 WIB

F. Peraturan Perundang-Undangan & Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Bengkulu Selatan, *Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka 2025*. Bengkulu Selatan: BPS, 2025.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, *Data Penyandang Disabilitas Mental Tahun 2025*, Bengkulu Selatan: Dinkes, 2025.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. *Data Penduduk Rentan Tahun 2025*. Bengkulu Selatan: Dinsos, 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas